

Original Article

Strategi Distribusi Beras Subsidi oleh Perum Bulog di Desa Kalahien Kabupaten Barito Selatan

Adi Setiawan^{1✉}, Abdul Khair², Kamal Hasuna³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Korespondensi Email: adhiesetiawan100@gmail.com ✉

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis strategi distribusi beras bersubsidi oleh Perum Bulog di Desa Kalahien, Kabupaten Barito Selatan. Masalah yang dikaji meliputi keterlambatan pengiriman, ketidaktepatan sasaran penerima, rendahnya transparansi, dan kualitas beras yang tidak konsisten. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta validasi data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi belum berjalan optimal akibat kendala logistik seperti kondisi geografis wilayah terpencil, terbatasnya armada, dan cuaca ekstrem. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian data DTKS yang menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran, kurangnya informasi resmi yang diberikan kepada KPM, serta lemahnya pengendalian kualitas beras. Temuan ini menekankan perlunya perbaikan strategi distribusi melalui pembaruan data penerima secara berkala, peningkatan koordinasi dengan pihak desa, serta penguatan sistem pemantauan dan pelaporan.

Kata kunci: Distribusi Beras Bersubsidi, Perum Bulog, Transparansi, DTKS

Submitted	: 26 February 2026
Revised	: 28 February 2026
Acceptance	: 3 Maret 2026
Publish Online	: 4 Maret 2026

Pendahuluan

Dalam upaya menjamin hak atas pangan, pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program subsidi, salah satunya adalah distribusi beras subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat khusus, yaitu Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Bulog memiliki peran strategis dalam stabilisasi harga pangan dan penyediaan beras melalui program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) BUMN, untuk memberikan informasi secara terbuka terkait program-program yang dibiayai negara dan menyangkut kepentingan publik ([UUD RI, “Keterbukaan Informasi”, 2008](#)).

Pangan merupakan sumber kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan untuk bertahan hidup, sehingga dikatakan bahwa hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu HAM (Hak Asasi Manusia). Menurut data Global Food Security Index (GFSI), ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. GFSI mencapai level 60,2 pada tahun 2022, meningkat 1,7% dibanding tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021, indeks turun menjadi 59,2. Indeks tersebut menempatkan ketahanan pangan Indonesia pada peringkat ke-63 dari 113 negara. GFSI menilai ketahanan pangan Indonesia berdasarkan empat indikator, yakni keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (*quality and safety*), serta ketahanan sumber daya (*natural resources and resilience*) ([Ahdiat, 2022](#)).

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penugasan Umum (Perum) Bulog dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional, Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga kestabilan, ketersediaan pangan, dan stabilisasi harga pangan pokok komoditi beras melalui beberapa kegiatan, yaitu: melakukan pengamatan harga beras di tingkat produsen dan konsumen; mengelola cadangan beras pemerintah; menyediakan dan mendistribusikan beras kepada golongan masyarakat tertentu; melakukan impor beras apabila persediaan dalam negeri tidak terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; mengembangkan industri berbasis beras, termasuk produksi padi/gabah dan pengolahan gabah serta beras; serta mengembangkan pergudangan beras ([Lilik Febryanti, 2023](#)).

Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) adalah salah satu perusahaan milik negara yang dibentuk pada tahun 1967, bergerak di bidang logistik pangan dan jasa industri, serta ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan menyediakan bahan pokok kepada konsumen. Perum Bulog telah dipercaya oleh Pemerintah untuk menyalurkan beras kepada masyarakat dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, menjaga stabilitas harga beras, serta mengamankan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ([Hartinah, 2022](#)).

Strategi distribusi merupakan serangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang untuk memastikan bahwa produk sampai ke tangan konsumen secara efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran. Dalam konteks distribusi beras subsidi, strategi yang digunakan oleh Perum Bulog sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Strategi distribusi mencakup aspek perencanaan logistik, pemilihan mitra kerja (agen dan pengecer), penggunaan teknologi informasi dalam pelacakan distribusi, dan sistem pengawasan untuk menghindari penyimpangan ([Siregar & Dede, 2022](#)). Keberhasilan program beras subsidi sangat ditentukan oleh sinergi antara strategi distribusi yang tepat dan pelaksanaan teknis di lapangan yang efisien.

Salah satu indikator keberhasilan distribusi adalah keterpenuhan jumlah beras yang didistribusikan sesuai kuota dan tepat waktu, serta diterima oleh masyarakat penerima manfaat sesuai data pemerintah ([Sari, 2019](#)). Oleh karena itu, evaluasi terhadap strategi distribusi yang dijalankan oleh Perum Bulog menjadi hal yang sangat penting, agar setiap hambatan dan kelemahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki ke depan (Ramadhan & Dede, 2021). Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya koordinasi antar pelaksana menjadi faktor utama tidak optimalnya distribusi beras subsidi, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil ([Susanti & Lilis, 2021](#); [Siregar & Dede, 2022](#)).

Penelitian skripsi oleh [Muhammad \(2016\)](#) dan [Sari \(2019\)](#) juga mengungkap bahwa mekanisme distribusi di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh peran aparat desa, kualitas data penerima bantuan, serta transparansi informasi kepada masyarakat.

Distribution Requirement Planning (DRP) mencakup lebih dari sekadar sistem perencanaan dan pengendalian pengisian kembali inventory, tetapi juga perencanaan dan pengendalian berbagai sumber daya yang sesuai dalam sistem distribusi, seperti: warehouse space, dana, fasilitas transportasi, tenaga kerja, dan warehousing (Suci, 2022). DRP bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi distribusi, memiliki penjadwalan produk yang dibutuhkan pada periode tertentu agar produk dapat dikirim tepat waktu, serta perencanaan muatan angkutan kendaraan agar kebutuhan dapat terpenuhi secara akurat. Informasi selalu diperbarui saat terjadi perubahan, sehingga dapat mengurangi tempat penyimpanan, biaya distribusi, dan persediaan, serta meminimalkan biaya penyimpanan produk ([Diah, 2020](#)).

Ketentuan pendistribusian beras Bulog mengikuti aturan ketat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Perdagangan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KSPH) serta Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk KPM. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan distribusi yang bersifat seragam secara nasional belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan daerah dengan kondisi geografis yang kompleks ([Pratama, 2020](#)). Diperlukan strategi distribusi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kondisi geografis dan sosial di daerah seperti Barito Selatan. Misalnya, pemanfaatan teknologi berbasis digital dalam pelacakan distribusi, penguatan kapasitas mitra distribusi lokal, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat desa ([Muhammad, 2016](#)).

Strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dalam menjamin akses pangan murah bagi rakyat ([Wulandari & Retno, 2023](#)).

Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang memiliki karakteristik geografis cukup kompleks. Sebagian wilayahnya masih berupa daerah pedalaman, dengan akses transportasi yang terbatas, terutama pada musim penghujan ([Maya, 2022](#)). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi instansi seperti Perum Bulog dalam melakukan distribusi beras subsidi. Infrastruktur jalan yang belum memadai, keterbatasan sarana angkut, serta jumlah agen dan titik distribusi yang terbatas merupakan masalah yang kerap muncul dan memerlukan strategi penanganan yang efektif ([BPS Kalimantan Tengah, 2023](#)).

Berdasarkan pengamatan awal di Kabupaten Barito Selatan, meskipun program distribusi beras subsidi masih berjalan secara rutin, terdapat beberapa keluhan dari masyarakat, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksamaan data penerima manfaat, serta kurangnya informasi mengenai jadwal distribusi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan strategi distribusi yang perlu diperbaiki. Selain itu, terdapat keluhan terkait kualitas beras yang tidak sesuai standar, serta sistem pelaporan yang masih bersifat manual dan lambat. Berdasarkan pendapat Kepala KCP Bulog Buntok, Sutaryo, pendistribusian beras subsidi dilakukan secara rutin per bulan sebanyak 51 ton 420 gram kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menganalisis pelaksanaan strategi distribusi beras

subsidi oleh Perum BULOG di Desa Kalahien, Kabupaten Barito Selatan; khususnya terkait efisiensi distribusi, ketepatan sasaran, transparansi program; dan kualitas beras. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 di Desa Kalahien, Kalimantan Tengah, yang dipilih karena merupakan wilayah penerima program beras subsidi dengan karakteristik geografis pedalaman dan akses transportasi terbatas. Subjek penelitian meliputi Keluarga Penerima Manfaat (KPM); agen penyalur; aparat desa pengelola DTKS; petugas Perum BULOG KCP Buntok; serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data.

Hasil Penelitian

Mekanisme Distribusi Beras Subsidi

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Kalahien, Kabupaten Barito Selatan, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), aparat desa, agen penyalur, serta petugas Perum BULOG KCP Buntok, diperoleh bahwa distribusi beras subsidi dilaksanakan melalui mekanisme penyaluran dari gudang Perum BULOG KCP Buntok kepada agen penyalur desa, dan selanjutnya disalurkan kepada KPM. Pendistribusian dilakukan secara rutin setiap bulan dengan jumlah sekitar 51 ton beras kepada KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya keterlambatan distribusi pada beberapa periode penyaluran yang disebabkan oleh kondisi geografis wilayah pedalaman serta keterbatasan sarana transportasi.

Ketepatan Sarana Penerimaan Bantuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penerima beras subsidi telah sesuai dengan data DTKS. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian data penerima bantuan. Beberapa keluarga yang secara ekonomi sudah tidak tergolong miskin masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara terdapat masyarakat yang tergolong miskin namun belum masuk dalam data penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembaruan data DTKS belum berjalan secara optimal.

Transparansi Informasi Distribusi

Transparansi pelaksanaan distribusi beras subsidi di Desa Kalahien masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM, sebagian besar penerima bantuan tidak mengetahui secara pasti jadwal distribusi, jumlah kuota beras yang diterima, maupun mekanisme penyaluran bantuan. Informasi distribusi umumnya diperoleh melalui penyampaian lisan dari agen penyalur atau masyarakat sekitar. Selain itu, tidak ditemukan papan informasi atau media pengumuman resmi yang memuat data penerima bantuan maupun jadwal distribusi.

Kualitas Beras Yang Diterima Masyarakat

Hasil observasi menunjukkan bahwa kualitas beras yang diterima masyarakat tidak selalu seragam. Sebagian KPM menyatakan bahwa beras yang diterima dalam kondisi baik dan layak konsumsi, namun terdapat pula keluhan mengenai kualitas beras yang kurang baik, seperti tingkat kebersihan yang rendah, beras patah dalam jumlah cukup banyak, serta aroma beras yang kurang segar. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyimpanan dan pengemasan beras subsidi belum sepenuhnya dilakukan dengan standar pengawasan kualitas yang konsisten.

Hambatan Pelaksanaan Distribusi

Penelitian menemukan beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan distribusi beras subsidi di Desa Kalahien, yaitu kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai, keterbatasan armada transportasi distribusi, kondisi cuaca ekstrem yang memengaruhi kelancaran pengiriman beras, koordinasi antar pelaksana distribusi yang belum optimal, serta sistem pelaporan distribusi yang masih dilakukan secara manual.

Pembahasan

Distribusi Tidak Efisien Akibat Hambatan Logistik

Menurut [Siregar & Dede \(2022\)](#), efektivitas distribusi dipengaruhi oleh kondisi geografis, kesiapan armada, serta koordinasi antar pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan logistik di Barito Selatan bersifat struktural, meliputi jalan rusak, keterbatasan armada, dan cuaca ekstrem. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian [Susanti & Lilis \(2021\)](#) mengenai hambatan distribusi di wilayah pedalaman Kalimantan.

Ketidak Tepatan Sasaran Karena Data DTKS Tidak Valid

Distribusi beras subsidi diwajibkan menggunakan data DTKS yang mutakhir. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala, antara lain data yang tidak diperbarui sehingga warga yang tidak layak tetap menerima bantuan, serta warga miskin baru yang belum masuk data, yang menimbulkan kecemburuan sosial. Temuan ini konsisten dengan evaluasi [Ramadhan & Dede \(2021\)](#) mengenai masalah akurasi data bansos di Indonesia.

Transparansi Yang Lemah Menyebabkan Informasi Tidak Merata

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan informasi mengenai program negara mudah diakses dan publik memperoleh pemberitahuan yang jelas. Namun, penelitian menemukan bahwa di lapangan tidak terdapat papan pengumuman maupun pemberitahuan resmi, sehingga KPM hanya bergantung pada informasi informal dari tetangga atau agen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi peraturan dan praktik nyata.

Inkonsistensi Kulaitas Beras Mengindikasi Pengawasan Lemah

Kualitas beras yang bervariasi menunjukkan bahwa pengemasan dan penyimpanan tidak diawasi secara konsisten, kemungkinan kelembaban di gudang tinggi, serta tidak ada petugas quality control yang memeriksa beras sebelum distribusi. [Wulandari & Retno \(2023\)](#) menekankan pentingnya pengawasan kualitas sebagai bagian dari strategi distribusi pangan nasional.

Perlu Strategi Distribusi Yang Lebih Adaptif

Berdasarkan temuan lapangan, strategi distribusi BULOG di Desa Kalahien perlu diperkuat melalui diversifikasi armada, misalnya menggunakan pickup dan perahu kecil pada musim hujan, peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, pembaruan data DTKS minimal dua kali setahun, serta penerapan sistem pelaporan digital untuk mengurangi keterlambatan distribusi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara, observasi, serta analisis terhadap strategi distribusi beras subsidi oleh Perum BULOG di Desa Kalahien, Kabupaten Barito Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal.

Proses distribusi beras subsidi belum berjalan efisien, terutama disebabkan oleh hambatan logistik seperti jalan rusak, kondisi geografis pedalaman, keterbatasan armada, dan cuaca ekstrem. Hambatan-hambatan ini menyebabkan keterlambatan pengiriman dan tidak terpenuhinya target distribusi tepat waktu.

Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat masih terjadi, yang dipicu oleh data DTKS yang tidak diperbarui secara berkala. Kondisi ini menyebabkan sebagian penerima tidak lagi layak namun masih tercatat, sementara warga miskin baru belum masuk ke dalam data bantuan. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan menghambat efektivitas distribusi.

Aspek transparansi distribusi masih lemah, ditandai dengan minimnya informasi resmi bagi KPM terkait jadwal pembagian, jumlah kuota, maupun prosedur distribusi. Tidak tersedianya papan informasi dan pemberitahuan formal mengakibatkan KPM bergantung sepenuhnya pada informasi informal dari agen atau tetangga.

Kualitas beras yang diterima juga tidak konsisten, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan (*quality control*). Variasi tingkat kebersihan, persentase beras patah, dan aroma apek pada beberapa sampel mengindikasikan bahwa pengemasan dan penyimpanan belum dikelola dengan standar yang sama di setiap titik distribusi.

Strategi distribusi BULOG masih perlu diperbaiki dan diarahkan menjadi lebih adaptif, termasuk diversifikasi armada untuk menghadapi kondisi geografis dan cuaca, peningkatan koordinasi dengan aparat desa, optimalisasi teknologi informasi dalam pelaporan dan pelacakan distribusi, serta pembaruan DTKS secara berkala minimal dua kali per tahun.

Secara keseluruhan, efektivitas distribusi beras subsidi sangat ditentukan oleh sinergi antara manajemen logistik BULOG, akurasi data penerima manfaat, transparansi informasi, kualitas pengawasan, serta adaptasi terhadap kondisi geografis lokal. Perbaikan dalam aspek-aspek tersebut akan meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi distribusi, dan kepercayaan masyarakat terhadap program pangan pemerintah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Perum BULOG perlu melakukan perbaikan strategi distribusi beras subsidi di Desa Kalahien dengan menyesuaikan sistem logistik terhadap kondisi geografis pedalaman, termasuk optimalisasi armada dan penjadwalan distribusi agar tidak terjadi keterlambatan. Pembaruan dan validasi data DTKS harus dilakukan secara berkala bersama pemerintah desa agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu, transparansi informasi perlu ditingkatkan melalui penyediaan informasi resmi mengenai jadwal, kuota, dan mekanisme distribusi sesuai prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Penguatan pengawasan kualitas beras serta penerapan sistem pelaporan berbasis digital juga penting untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap program distribusi beras subsidi.

Daftar Pustaka

- Ahdiat, A. (2022). *Indeks Ketahanan Pangan Negara ASEAN 2022*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/02/21/indeks-ketahanan-pangan-negara-asean-tahun-2022>.
- Badan Pangan Nasional. (2022). *Laporan Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan Nasional*. Bapanas RI.

- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2023). *Kalimantan Tengah dalam Angka 2023*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Diah, P. (2020). *Penjadwalan distribusi produk dengan penerapan metode Distribution Requirement Planning di PT. X* (Skripsi, Universitas Udayana, Bandung).
- Hartinah, P. U. (2022). Analisis persediaan beras di Perum Bulog Subdivre Wilayah IV Banyumas (Studi Kasus pada Gudang Bulog Sokaraja Kulon dan Klahang). *Jurnal Prosiding Seminar Agribisnis VI*, 6(1), 131–136.
- Lilik Febryanti, T. S. (2023). Analisis pengadaan dan pengendalian persediaan beras pada Bulog Kantor Cabang Kendiri. *Jurnal Pertanian Agros*, 25(1), 9–61.
- Maya Asyifa Aulia, L. S. (2022). Perencanaan distribusi produk gas PT. Perbbak Trolilh Lestari menggunakan metode Distribution Requirement Planning (DRP). *Jurnal Ilmiah Statistika dan Ekonomi*, 2(1), 4–5.
- Muhammad, I. L. (2016). *Pola distribusi beras miskin di tingkat desa* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga).
- Perum BULOG. (2023). *Laporan Operasional Distribusi Beras Subsidi Kabupaten Barito Selatan*. BULOG KCP Buntok.
- Pratama, R. A. (2020). *Distribusi beras subsidi di daerah terpencil* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Ramadhan, A., & Dede, S. (2021). Evaluasi akurasi data DTKS dalam penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 122–134.
- Sari, D. P. (2019). *Implementasi distribusi beras subsidi di wilayah pedesaan* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).
- Siregar, R., & Dede, M. (2022). Strategi logistik dalam pendistribusian bahan pangan pemerintah. *Jurnal Manajemen Logistik*, 5(1), 45–58.
- Susanti, A., & Lilis, R. (2021). Tantangan distribusi pangan di wilayah pedalaman Kalimantan. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 9(3), 211–224.
- Suradi, A. H. (2019). Optimasi pendistribusian produk dengan menggunakan metode Distribution Requirement Planning (DRP): Studi kasus di PT. Makassar Ta'ne. *Iltek*, 14(01), 1993–1994.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UUD RI. (2008). *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara RI.
- Wulandari, T., & Retno, S. (2023). Pengawasan kualitas beras dalam program pangan nasional. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 11(1), 67–78.